

IMPLEMENTASI KONSEP SMARTCITY DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE STUDI KASUS KOTA TANGERANG SELATAN

Rr. Fitri Supriyantiwi¹, Mallory Sianturi², Safrudin³, S.Santoso⁴
^{1,2,3,4}Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email ¹tiwi.soediby@gmail.com, ²charliejo81@gmail.com,
³[safrudinsh2@gmail.com](mailto:sufrudinsh2@gmail.com), ⁴zoneanto@gmail.com

ABSTRAK

Smart city merupakan konsep pengelolaan kota yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya serta keterbukaan informasi gunaantisipasi terhadap dampak yang mungkin akan timbul akibat adanya suatu kegiatan, khususnya dalam pelayanan masyarakat. cita-cita Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam good governance terutama dalam meningkatkan pelayanan Publik (Publik Service) sangat dibutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, sehingga dengan tingginya kesadaran masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketercapaian Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien dn mandiri menuju konsep Smart City tahun 2021, semata-mata diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kerja sama/partisipasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah yang harus saling mendukung demi ketercapaian program dan konsep Smart City ini secara optimal.

Penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan sebagai kendala dalam penerapan smart city dari segi pelayanan dalam mewujudkan good governance.

Kata kunci : seminar, nasional, smart governance, smart publik service

ABSTRACT

Smart City is a concept of city management that emphasizes the efficiency of use of resources and disclosure of information to anticipate the impact that may arise due to an activity, especially in community service. The ideals of South Tangerang city government in good governance, especially in improving public services (public Service) is needed support from all walks of life, so that with the high awareness of society has a huge role in the achievement of good governance, clean, effective, efficient and independent to the concept of Smart City in 2021, solely for the benefit of society, so that the need for cooperation/participation Between the community and the Government that must support each other for the optimal achievement of this Smart City program and concept. This research describes several problems as constraints in implementing smart City in terms of service in realizing good governance.

Keywords: seminar, national, smart Governance, smart public service



1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kekuasaan orde baru membawa dampak signifikan terhadap perubahan tatanan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hadirnya Otonomi daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dari undang – undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan bagian dari penguatan otonomi daerah dalam bingkai NKRI yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan hak serta wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga melahirkan reformasi birokrasi yang membawa Pembaharuan pola dan sistem kinerja birokrasi yang tidak saja melihat dari segi politik, social dan budaya, namun mmemberikan keseimbangan dalam penerapan Peraturan perundang – undangan, mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai karakteristik budaya yang berbeda. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang bertujuan agar reformasi birokrasi lebih terarah dan berkesinambungan.

Inisiatif pemerintah yang terus berupaya melembagakan upaya reformasi dengan menggunakan manajemen strategis yang keberlangsungan guna tercapainya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas serta penguatan kepada pelayanan *public*. Konsep *good government* akan tercapai ketika sumber daya manusia dari aparatur sipil Negara mempunyai kualitas pemahaman dan mengimplementasikan dalam praktek administrasi guna tercapainya maksud dari *good government*.

Pelaksanaan *good government* yang benar - benar jadi tantangan dari setiap pemerintahan di era sekarang dengan sistem

otonomi Daerah mampu melaksanakan *refunctioning* kewenangan - kewenangan pusat dan daerah, sehingga dituntut dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas, baik, bersih, efektif, efisien dan mandiri serta dapat menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi telah memisahkan diri dari Kabupaten Induk Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang nomor : 51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, dan sejak itulah Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara bertahap terus mengupayakan pola pemerintahan yang baik disemua lini kedinasan terutama dalam hal kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan pelayanan secara real –time dan cepat mulai dari Instansi terbawah sampai kepada Instansi kedinasan yang lebih tinggi dengan system smart city.

Konsep smart city yang tertuang pada Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan. Dinyatakan bahwa mengelola kota untuk menjadi cerdas berkelanjutan merupakan kewajiban yang tidak dapat dibantah keberadaannya sesuai dengan kemampuannya dalam mengembangkan konsep kota cerdas yang meliputi: *intelligent city*, *green city*, *digital city*, *liveable city* dan *sustainable city*. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

konsep Smart City dalam bidang pelayanan publik merupakan bagian dari konsep *good governance* yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya menciptakan tata kelola Pemerintahan dengan motto Kota Tangerang Selatan “ cerdas, modern dan religius “.

B. Perumusan Masalah



Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dengan pertanyaan Sebagai Berikut :

1. Bagaimanakah konsep smart city dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimanakah implementasi konsep smart city pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan smart governance?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi hakikatnya memberikan pedoman tentang serangkaian cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian secara normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap sistem pemerintahan kota tangerang selatan baik melalui perpustakaan, buku maupun internet.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

II. Pembahasan

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), menurut Bahatta dan Nisjar adalah adalah: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*).¹

Konsep Smart city dianggap sebagai inovasi yang mampu menjawab tantangan di era digital dalam mewujudkan good governance, sehingga diharapkan mampu

memberikan kepuasan terhadap masyarakat dengan dimensi kerangka pikir sebagai berikut :

1. Smart governance
Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).
2. Smart Branding
Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional
3. Smart Economy
Smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan
4. Smart Living
Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien
5. Smart Society
Sasaran dari smart society adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital Literacy yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem

¹ Joko Widodo, *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001 hal. 1



pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security)

6. Smart Environment

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan

7. Smart Regional

Smart Regional merupakan kombinasi antara kemampuan (capability) berdasarkan readiness dan kinerja daerah berdasarkan performa Smart Region (performance). Tingkat kematangan suatu daerah sebagai Smart Region dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu initial, developing, managed, dan optimized. Initial artinya daerah baru memulai membangun Smart Region. Bisa pada posisi readiness dan performance yang sama-sama rendah, atau readiness yang cukup baik yang ditandai dengan kesiapan sumber daya manusia (smart people), infrastruktur, regulasi, dan kultur masyarakat yang mendukung.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara bertahap terus mengupayakan konsep smart city disemua lini kedinasan terutama dalam hal kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan pelayanan secara real-time dan cepat mulai dari Instansi terbawah sampai kepada Instansi kedinasan yang lebih tinggi.

Suatu insitusi yang berada dalam system pemerintahan pada suatu Negara atau daerah yang dijalankan oleh aparatur Negara atau birokrasi penyelenggara negara atau daerah, tentunya bertujuan memberikan suatu pelayanan yang baik atau pelayan public guna mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good Governance*). Oleh karena itu, upaya pemahaman konsep birokrasi pemerintah, pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik pada satu sisi, menempati posisi kunci dalam disertasi ini, dan pada sisi lain akan menjadi dasar pengembangan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pendefinisian birokrasi pemerintah, pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya pada bagian ini juga mengetengahkan pokok

bahasan yang berkaitan dengan pemahaman teoritik tentang birokrasi pemerintah dan pelayanan publik. Pemahaman teoritik ini penting dilakukan sebagai sarana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan, serta memahami masalah secara lebih baik.²

Dalam rangka menerapkan sebuah konsep Pemerintahan yang cerdas khusus pelayanan Publik (Public service) menuju konsep Smart City Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membangun Aplikasi sistem pengaduan dan pelaporan dengan nama SIARAN guna memudahkan sistem pelayanan dimasyarakat yang dapat diakses melalui internet secara online diinstansi tingkat bawah mulai dari pelayanan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP), pelayanan Kartu Keluarga (KK), pelayanan SIM dan jenis-jenis pelayanan perizinan lainnya yang semua itu ditujukan untuk memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat

Meluncurkan Aplikasi “ Tangsel Pay “ untuk pembayaran restribusi dan perpajakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, Aplikasi ini telah mulai diterapkan disemua Instansi Pemerintah di jajaran Kota Tangerang Selatan, namun demikian esensi layanan publik terletak bukan pada kecanggihan sarana pelayanan tersebut, tetapi pada pelayanan itu sendiri sangat dibutuhkan faktor komitmen dan kredibilitas orang-orang yang melayani menjadi suatu yang fundamental, dan tuntutan teknologi memainkan peranan penting sebagai hal yang tidak bisa kita tolak untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut, disamping peran seorang pemimpin yang aktif dan sungguh-sungguh dalam membenahi layanan publiknya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan cita-cita Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam smart governance terutama perbaikan pelayanan Publik (Smart Publik Service) perlu adanya dukungan dari semua lapisan masyarakat,

² Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h. 10



kesadaran masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketercapaian Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien dan mandiri menuju konsep Smart City tahun 2021, mengingat konsep menjadikan Kota Tangerang Selatan menjadi kota Pintar (Smart City) semata-mata diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kerja sama/partisipasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah yang harus saling mendukung demi ketercapaian program dan konsep Smart City ini secara optimal

A. Gambaran konsep smart city dikota Tangerang Selatan.

Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik (Poltak. 2005 : 5), maka mutu pelayanan yang baik harus dilihat melalui tatanan organisasi pemerintahan yang baik, Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati (Winston Dictionary.1956).

Dalam rangka menerapkan sebuah konsep Pemerintahan yang cerdas (smart city) khusus pelayanan Publik (Publik service) menuju konsep Smart City Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membangun Aplikasi sistem pengaduan dan pelaporan dengan nama SIARAN guna memudahkan sistem pelayanan dimasyarakat, melakukan pemasangan CCTV ditempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat serta pada perempatan jalan yang sering ditemui kemacetan, Meluncurkan Aplikasi “ Tangsel Pay “ untuk pembayaran restribusi dan perpajakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, menyediakan Jaringan Wiffi dan menempatkan Blue Print disemua birokrasi, Aplikasi ini telah mulai diterapkan disemua Instansi Pemerintah di jajaran Kota Tangerang Selatan, namun demikian esensi layanan publik terletak bukan pada kecanggihan sarana pelayanan tersebut, tetapi pada pelayanan itu sendiri, untuk itu faktor komitmen dan kredibilitas orang-orang yang melayani menjadi suatu yang fundamental, teknologi memainkan peranan penting sebagai hal yang tidak bisa kita tolak untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut, disamping peran seorang pemimpin yang aktif dan sungguh-sungguh dalam membenahi layanan publiknya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 telah menganugerahkan penghargaan kepada Kota Tangerang Selatan sebagai daerah menuju smart city, penghargaan yang diraih ini memacu Pemkot Tangsel untuk terus mensosialisasikan Master Plan smart city kepada masyarakat, penghargaan kedua pun kemudian didapat kembali pada tahun 2018 yaitu penghargaan indek Kota Cerdas oleh Surat Kabar ternama di Indonesia KOMPAS karena dinilai telah berhasil menerapkan konsep kota cerdas menuju smart city 2021, tidak sampai disitu pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan dan penganugerahan dalam Indonesia award yang diberikan oleh salah satu stasiun



Gambar 1 Smart City Framework



televisi swasta terkait kota yang konsisten dalam pelayanan publik.

Ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya membenahi tata kelola Pemerintahan yang baik, cerdas, efektif, efisien dan mandiri serta ditunjang dengan Infrastruktur yang baik pula. Kesiapan Kota Tangerang Selatan untuk menjadikan kota Tangerang Selatan sebagai kota pintar sangat jelas terlihat dari upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dalam menuju konsep smart city tahun 2021.

B. Kebijakan smart city kota Tangerang Selatan.

Bedasarkan arahan dari Walikota Tangerang Selatan, maka arahan pengembangan smart city di Kota Tangerang Selatan ini adalah “Tangerang Selatan Smart City adalah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah perkotaan dengan cepat. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana teknologi mampu memperpendek jalur komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat”.³

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antar berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi maupun lingkungan yang kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Tangerang Selatan saat ini sedang menghadapi permasalahan pembangunan yang bersifat strategis yaitu :

- 1) Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi,
- 2) Tingkat pendidikan masyarakat yang belum optimal.
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
- 4) Layanan kesehatan masih belum optimal.
- 5) Perumahan layak huni yang belum dapat terjangkau oleh masyarakat,
- 6) Sistem layanan publik yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih banyak lagi permasalahan yang

harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,

Sementara itu paradigma pembangunan kota dalam menuju konsep smart city secara dinamis akan mempengaruhi isu-isu strategis pembangunan kota Tangerang Selatan. Berdasarkan kondisi yang dihadapi, isu-isu strategis dan arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD kota Tangerang Selatan tahap kedua, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat, Kota Tangerang Selatan telah menetapkan visi berkualitas pembangunan 2016-2021 yaitu mewujudkan kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.

Visi Kota cerdas (smart city) dikedepankan dan menjadi pondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang mencerminkan konsep sistematis, efisien, efektifitas partisipasi dan akutabilitas, prinsip ini kemudian diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart people, smart economy, smart mobility, Smart environment, smart living dan smart governance dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan cerdas menuju konsep smart city 2021.

(smart city kota tangsel)



Gambar 2. Smart city kota tangsel ilustrasi.

C. Hasil Analisa

³ Hj. Airin Rachmi Diany, SH.MH, Menata Tangsel sudah, sedang dan akan dilaksanakan. 2018



Berdasarkan hasil analisis penerapan konsep pemerintahan yang cerdas (smart governance) dalam Smart Publik service yang telah dilaksanakan di Kota Tangerang selatan dalam menuju konsep Smart City telah berjalan dengan baik disemua Instansi Pemerintahan, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah untuk menjadikan Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Pintar (Smart City) diantaranya adalah kebiasaan masyarakat, budaya dan kultur yang ada dimasyarakat, belum adanya payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah berupa Peraturan Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim mengenai pengetahuan berbasis Teknologi (IT) yang siap menjalankan Program Smart City, ketersediaan anggaran yang saat ini masih bersifat sentralisasi dan terkait dengan birokrasi, dan kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung konsep Smart City ini

Berdasarkan uraian diatas, hasil analisa melalui pengamatan dilapangan dan nara sumber yang dapat dipercaya diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian konsep smart city dalam penerapan smart governance pelayanan publik meliputi berbagai aspek :

1. Peraturan Daerah (PERDA).

- a. Belum dibuatnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan sebagai landasan hukum tentang konsep smart city menjadikan kinerja birokrasi disemua instansi dirasakan kurang optimal karena mudah untuk tidak dipatuhi dan diabaikan meskipun infrastruktur yang menunjang konsep smart city dalam smart governance tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- b. Seringnya dilakukan pergantian unsur pimpinan baik unsur pimpinan yang terdapat di diskominfo maupun unsur pimpinan birokrasi kewilayahan sehingga berdampak pada pengambilan kebijakan dalam menjalankan konsep smart city dan penerapan smart governance dalam

pelayanan publik menjadi kurang optimal

2. Sumber Daya Manusia (SDM).

- a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan berlatar belakang pendidikan berbasis Ilmu teknologi (IT) membuat kesulitan tersendiri bagi masyarakat dan pelaksana birokrasi yang ada dilapangan.
- b. Kurangnya sosialisasi dari birokrasi kepada masyarakat, sehingga hampir 75% masyarakat belum mengetahui dan mengerti mengenai konsep smart city dan smart governance tentang pelayanan publik yang sedang dilaksanakan.

3. Anggaran

- a. Sistem Anggaran yang masih bersifat sentralisasi terkait birokrasi sering menjadi faktor penghambat kelancaran dalam penggunaan IT pelayanan publik, contoh : jika terdapat kerusakan pada instrumen IT yang terjadi pada birokrasi dibawah (Kantor Camat, Lurah) atau birokrasi lainnya, maka perbaikannya tidak dapat langsung ditangani mengingat harus diajukan anggarannya dahulu dan hal seperti itu tentu membutuhkan waktu yang lama.
- b. Kewenangan daerah yang tumpang tindih dengan kewenangan Pemkot Tangsel dalam bidang Infrastruktur jalan membuat masing-masing kepada daerah saling mengandalkan, contoh : kerusakan yang terjadi pada jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, maka harus menunggu anggaran dari provinsi, ini merupakan salah faktor penghambat dalam kelancaran pelayanan publik.

4. Kesadaran masyarakat.

- a. Kurang gencarnya sosialisasi dari Pemerintah atas dicanangkannya konsep smart city pada birokrasi kewilayahan membuat hampir sebagian masyarakat tidak paham dan tidak mengerti bahkan tidak tahu mengenai konsep smart city yang sedang dijalankan terutama smart



governance dalam pelayanan publik, sehingga menjadi kendala yang serius dalam ketercapaian tujuan tersebut.

- b. Belum sepenuhnya tercipta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketercapaian konsep smart city karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia yang ada. Setelah memperhatikan dan mengamati tentang keinginan Kota Tangerang Selatan menjadi sebuah kota yang cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan mandiri terlebih dalam menuju konsep smart city yang telah dicanangkan Pemerintah tentunya tidak hanya sekedar wacana melainkan harus sudah menjadi komitmen masyarakat bersama Pemerintah mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang cerdas dengan tata kelola yang baik

III. Penutup

Dari uraian sebagaimana yang dituangkan dalam jurnal ini, maka dapat diambil kesimpulan sementara tentang faktor yang menjadi kendala dan penyebab kurang optimalnya penerapan smart governance terutama dalam sistem layanan publik di kota Tangerang Selatan dalam menuju konsep smart city 2021 sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi dirasakan belum sepenuhnya mendukung program Pemerintah dalam menjadikan kota ini menjadi kota cerdas dan pintar, ini dapat dilihat dari hampir sebagian penduduk Kota Tangerang Selatan yang tidak tahu dan tidak mengerti program konsep smart city yang tengah dijalankan Pemerintah Sehingga Program yang sangat penting ini terasa diabaikan begitu saja oleh sebagian masyarakat.
2. Faktor sumber daya manusia.

Keterbatasan Ilmu Pengetahuan dimasyarakat tentang Teknologi adalah menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya konsep smart city yang tengah dijalankan, sehingga program-program untuk menjadikan Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota yang cerdas menjadi batu sandungan bagi pelaksana yang ada dibirokrasi karena dihadapkan oleh kebiasaan masyarakat menggunakan cara-cara lama sesuai kultur dan kebudayaanya.

3. Faktor Legal standing

Kedudukan Hukum atau status hukum yang menjadi payung dalam pelaksanaan menuju smart city di kota Tangerang Selatan belum jelas kapan ditentukannya, sehingga bagi para pelaksana yang di diboraksi terutama birokrasi yang ada dibawah sering tidak melakukan kewajibannya secara optimal karena mereka merasa tidak terikat dengan aturan.

4. Faktor Anggaran

Anggaran menempati peranan yang vital dalam sukses atau tidaknya sebuah perencanaan, masih terkendalanya anggaran dalam menunjang konsep smart city di Kota Tangerang Selatan bukan disebabkan ketidaksiannya anggaran, tetapi lebih dikarenakan adanya sistem sentralisasi yang terkait dengan birokrasi ditingkat daerah, sehingga anggaran yang semestinya sudah siap di Pemerintah kota terkadang pencairannya harus menunggu pada birokrasi yang terdapat di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Hj. Airin Rachmi Diany, SH.MH, Menata Tangsel sudah, sedang dan akan dilaksanakan. 2018

Gunartin, Dosen Manajemen Unpam Analisa faktor kendala smart mobility, Garuda.ristekdikti.go.id



David oliver Purba, Kompas.com 2018,
Tangsel ingin jadi smart city 2021 Leo Dwi
Jatmiko, juli 2019,

Bisnis.com, Jaringan Konektivitas Indonesia
cukup untuk bangun smart city Reny Lestari,
Bisnis.com 2019

Realisasi smart city perlu landasan Hukum
PP 96 tahun 2012, tentang pelaksanaan UU
nomor.25 tahun2009, tentang Pelayanan
Publik

Joko Widodo, *Good Governance* (Telaah
dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan
Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya,
2001

Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini,
Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam
Perkembangan Sosiologi, Sinar Grafika,
Jakarta,